



10 SMP Negeri di KP Kekurangan Siswa

KULONPROGO—Sebanyak 10 SMP dari total 41 sekolah di Kabupaten Kulonprogo kekurangan siswa dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini.

Triyo Handoko, Stefani Yulindriani, & Andreas
Yuda Pramono
redaksi@harianjogja.com

- ▶ Data Disdikpora Kulonprogo menyebut sekolah negeri yang paling banyak kekurangan siswa adalah SMPN 3 Girimulyo.
- ▶ Disdikpora Bantul menerima belasan aduan pada hari pertama PPDB jalur zonasi reguler.

SMP yang kekurangan siswa itu kebanyakan berada di Perbukitan Menoreh. Sebanyak 10 SMP Negeri yang belum terpenuhi daya tampungnya meliputi SMPN 1 Samigaluh, SMPN 2 Samigaluh, SMPN 3 Samigaluh, SMPN 4 Samigaluh, SMPN 1 Girimulyo, SMPN 3 Girimulyo, SMPN 4 Girimulyo, SMPN 2 Kokap, SMPN 3 Kokap, dan SMPN 4 Pengasih.

Data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo menyebut sekolah negeri yang paling banyak kekurangan siswa adalah SMPN 3 Girimulyo. Dari 128 bangku yang tersedia baru terisi 47 murid sehingga SMP tersebut masih kekurangan 81 siswa. Kekurangan siswa terbanyak kedua diduduki SMPN 2 Samigaluh dengan daya tampung 96 siswa baru terpenuhi 28 murid sehingga ada 68 bangku yang kosong.

10 SMP Negeri...

Adapun SMP yang tak terpenuhi daya tampungnya dalam jumlah terkecil adalah SMPN 4 Samigaluh kurang enam murid saja dengan daya tampung 64 bangku dan sudah terisi 58 siswa. SMP lain yang belum terpenuhi daya tampungnya adalah SMPN 3 Kokap yang hanya kurang tujuh siswa dengan taya tampungnya 32 siswa dan sudah diisi 25 murid.

Kepala Bidang SMP Disdikpora Kulonprogo, Dorajatun Kuncoroyakti, menyebut data tersebut bersifat sementara lantaran masih ada proses daftar ulang. "Ada kemungkinan siswa tidak jadi bersekolah di tempat yang sudah diterima, karena masih proses daftar ulang mulai hari ini [kemarin] sampai Rabu [3/7] nanti," jelasnya.

Kuncoro menjelaskan adanya 10 sekolah negeri di wilayahnya yang belum terpenuhi daya tampungnya menjadi bahan evaluasi untuk mengurangi rombongan belajarnya. Pengurangan rombongan belajar masih memungkinkan, tetapi untuk menggabungkan atau mengurangi sekolah sudah tidak mungkin dilakukan. "Terutama di Kawasan Menoreh. Tidak mungkin sekolah digabungkan karena jaraknya sudah saling berjauh-jauhan, kalau dikurangi nanti akses masyarakat akan terkendala," ungkapnya.

Penyebab 10 SMP yang kekurangan siswa, menurut Kuncoro, karena kepadatan penduduk yang tak merata dan perubahan preferensi orang tua dalam menyekolahkan anaknya. "Dulu kalau bukan sekolah negeri tidak mau, sekarang sekolah swasta sudah bersaing dan jadi pilihan utama juga. Jadi memang banyak yang ke sekolah swasta," katanya.

Kuncoro menerangkan meskipun terdapat 10 SMP dari total 41 sekolah menengah pertama negeri di Kulonprogo yang kekurangan murid tetapi jumlah lulusan SD jauh lebih banyak.

Kondisi yang sama juga terjadi di Gunungkidul. Sekretaris Disdik Gunungkidul, Agus Subariyanta, mengatakan jumlah kuota jalur

prestasi ada sebanyak 1.767 kursi. Adapun jumlah pendaftar di jalur ini ada 1.418 kursi. "Artinya kuota jalur prestasi tidak terpenuhi. Tapi tidak banyak dibandingkan dengan afirmasi dan perpindahan tugas orang tua," kata Agus.

Akibat tidak terpenuhinya kuota jalur prestasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua (PTO), kuota sisa dilimpahkan ke kuota jalur zonasi reguler. Kuota zonasi reguler ada 3.843 kursi. Jumlah pendaftar yang diterima ada 3.933 orang. "Kalau kendala di jalur zonasi reguler memang ada pergeseran titik, tapi sudah kami perbaiki di dinas. PPDB jenjang SMP selesai dan kami masuk tahap daftar ulang siswa," katanya.

Pergeseran titik disebabkan oleh input data domisili untuk proses penitikan atau keliru. Titik sering menjadi celah untuk orang tua menyiasatinya agar masuk zonasi.

Agus telah menyampaikan data dalam KK puluhan calon siswa memang sempat terpental atau ditolak sistem. Hal ini akibat titik koordinat penitikan atau tidak sesuai antara KK dengan data inputan.

Kekeliruan ini menurut Agus akibat kesengajaan orang tua agar dia masuk ke jangkauan zonasi. Hal ini tidak terlepas dari pola pikir orang tua yang masih terpaku pada status sekolah unggulan dalam proses PPDB 2024.

Pemegang KMS

Kepala Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan, Data dan Sistem Informasi Disdikpora Kota Jogja, Manarima, menyebut akan ada calon siswa (casis) pemegang KMS yang tak lolos pada jalur afirmasi.

Jumlahnya bahkan hampir mencapai 50%. Ini disebabkan oleh terbatasnya kuota jalur afirmasi KMS.

Sekolah hanya diperkenankan menyediakan 11% dari total kursi untuk alokasi jalur ini. "Ada sekitar 700-an berapa [casis pemegang KMS], sementara kuotanya hanya 300 sekian,"

ujar Manarima.

Sepuluh dari pemegang KMS yang tak diterima lewat jalur afirmasi KMS itu bukan berarti sama sekali tak ada yang diterima di sekolah negeri.

Manarima menyebut ada pemegang KMS yang memang sudah mendaftar dan lolos lewat jalur zonasi radius. "Ada 11 persen khusus untuk KMS, totalnya 381 tersebar di 16 SMP negeri di Kota Jogja."

Terima Aduan

Disdikpora Bantul menerima belasan aduan pada hari pertama PPDB jalur zonasi reguler. Kepala Bidang SMP Disdikpora Bantul, Retno Yulie, menyampaikan sebagian besar masyarakat yang datang ke Posko PPDB lantaran mengalami kendala terkait dengan status famili lain dalam kartu keluarga (KK).

Ia menuturkan dalam PPDB kali ini status famili lain dapat mendaftar PPDB, tetapi siswa yang bersangkutan harus tercantum di KK orang tua atau kakek nenek. "Dalam peraturan ada ketentuan famili lain, itu harus dibuktikan dengan akta perceraian dan sebagainya. Ada beberapa akta yang masih ada di daerah lain," katanya.

Kusnadi, warga Pundong datang ke Posko PPDB Disdikpora Bantul lantaran kebingungan terkait dengan pendaftaran PPDB jalur prestasi. Dia mengaku baru mengetahui mekanisme penambahan nilai untuk PPDB jalur prestasi. "Tadi jalur penambahan nilai, tapi sudah selesai [sudah tutup jalurnya]," katanya.

Wakil Kepala SMPN 4 Depok, Sleman, Sri Wahyuningsih, menjelaskan mengantisipasi pelanggaran data kependudukan, sekolah dengan ketat mencermati data kependudukan pendaftar. "Harus dicek dulu kalau zonasi wilayah, dasarnya KK. Kami cek betul KK-nya, memenuhi syarat enggak. Misalkan ini kan KK [minimal] satu tahun. Kemudian anak dan orang tua harus ada dalam satu KK, kami cek juga." (Lugas Suberkah & Aiff Annisa Karim)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005